



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng 92812

Telepon (0414) 22333

Pos el setda@kepulauansehayarkab.go.id

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 72/IV/TAHUN 2025/SETDA**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN
SELAYAR NOMOR 1/I/TAHUN 2025/SETDA TENTANG PENGANGKATAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN LINGKUP SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian Organisasi maka Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 55/II/Tahun 2025/Setda tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 1/I/Tahun 2025/Setda tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 perlu diubah dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);



7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Surat Keputusan Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 215);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 55/II/Tahun 2025/Setda tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 1/I/Tahun 2025/Setda tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 55/II/Tahun 2025/Setda tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 1/I/Tahun 2025/Setda tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 9 April 2025

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIS DAERAH,**



MESDIYONO

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
6. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 72/IV/TAHUN 2025/SETDA
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR
1/1/TAHUN 2025/SETDA TENTANG TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA KEGIATAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM STRUKTURAL ORGANISASI
1	SEKRETARIAT DAERAH		
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ANDI MUHAMMAD AWALUDDIN, SAP/ 19791213 200604 1 020	Kepala Bagian Umum dan Protokol s da
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	s da	s da
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	s da	s da
4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	s da	s da
5	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	s da	s da
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	s da	s da
7	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	s da	s da
8	Penyediaan Pakan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	s da	s da
9	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	s da	s da
10	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	s da	s da
11	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	s da	s da
12	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	s da	s da
12	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	s da	s da
II	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM		
	A. BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL		
1	Penggadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	ANDI MUHAMMAD AWALUDDIN, SAP/ 19791213 200604 1 020	Kepala Bagian Umum dan Protokol s da
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	s da	s da
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	s da	s da
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	s da	s da
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	s da	s da
6	Penyediaan Bahan/Material	s da	s da
7	Fasilitas Kunjungan Tamu	s da	s da
8	Penggadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	s da	s da
9	Penggadaan Mebel	s da	s da
10	Penggadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	s da	s da
11	Penggadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	s da	s da
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	s da	s da
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	s da	s da

NO	NAMA KEGIATAN	NAMA/ NIP	DALAM STRUKTURAL ORGANISASI
1	2	3	4
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	sda	sda
16	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	sda	sda
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	sda	sda
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sda	sda
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sda	sda
20	Fasilitasi Keprotokolan	sda	sda
21	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	sda	sda
B. BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ANDI MUHAMMAD AWALUDDIN, SAP/ 19791213 200604 1 020	Kepala Bagian Umum dan Protokol sda sda
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	sda	sda
3	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	sda	sda
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	sda	sda
C. BAGIAN ORGANISASI			
1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Drs. TAUFIQ NURHARAS, M. Ec. Dev/ 19680828 198811 1 002	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sda sda
2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	sda	sda
3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	sda	sda
4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	sda	sda
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	sda	sda
III ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
A. BAGIAN PEMERINTAHAN			
1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Dr. TAJUDDIN MAKKA, S.STP., M.M./ 19830910 200312 1 005	Kepala Bagian Tata Pemerintahan sda sda
2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	sda	sda
3	Fasilitasi Otonomi Daerah	sda	sda
4	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	sda	sda
B. BAGIAN HUKUM			
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Hj. MIMI JULIANTI, S.H., M.H./ 19720428 200312 2 005	Kepala Bagian Hukum sda sda
2	Fasilitasi Bantuan Hukum	sda	sda
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	sda	sda
C. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
1	Pelaksanaan STQH Tingkat Provinsi	H. SAMSUL BAHRI, S.E./19701016 199803 1 012	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sda sda
2	Pelaksanaan STQH Tingkat Kabupaten	sda	sda
3	Pelaksanaan Pembangkitan Jamaah Haji	sda	sda
4	Pelaksanaan Penulangan Jamaah Haji	sda	sda
5	Pelaksanaan Penyeluruan Dana Hibah/Bansos	sda	sda
6	Pengelolaan dan Evaluasi Pendidik Tilawatil Qur'an, Kitab Kuning, Hafidz dan Iman Tetap Mesjid Agung	sda	sda
7	Pelaksanaan Hari-hari Besar Islam	sda	sda
8	Penyaluran Insentif Guru BTQ	sda	sda
9	Pemberian Santunan Veteran kepada Anggota Veteran dan Onderstand	sda	sda

IV. ASISTEN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

Balai Besar - UJITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
Sertifikasi - Dokumen ini diandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
Elektronik - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



NO	NAMA KEGIATAN	NAMA/NIP	JABATAN DALAM STRUKTURAL ORGANISASI
1	2	3	4
A. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM			
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	MURSAULIM, S.Sos./19841207 201101 1 010	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Air
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	s d a	s d a
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	s d a	s d a
4	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	s d a	s d a
5	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	s d a	s d a
6	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	s d a	s d a
B. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			
1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Drs. TAUFIQ NURHARAS, M. Ec.Dev/ 19680828 198811 1 002	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	s d a	s d a
3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	s d a	s d a
C. BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA			
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	HASRUL, S.E./19790129 200604 1 011	Kasubag. Pengelolaan Barang dan Jasa
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	s d a	s d a
3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	s d a	s d a



a.n.
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIS DAERAH,

 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
MESDIYONO



Balai Besar - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
 Sertifikasi - Dokumen ini dilandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
 Elektronik - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code